

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengendalian Internal (*Internal Control*)**

##### **2.1.1 Pengertian Pengendalian Internal**

*Committee on Auditing Procedures, SAS (Statement on Auditing Standart)*

No. 1 dalam Andayani (2011:46) mengatakan bahwa

*“Internal Control comprises the plan of organization an all of the coordinate methods and measures adopted within a business to safeguard its assets, check the accurasy and encourage adherence to prescribed managerial policies. This defenition possibly is broader than the meaning sometimes attributed top them. It recognized that a system of internal control extends beyond these matters which relate directly to the functions of the accounting and financial department.”*

Dari defenisi diatas dapat dinyatakan bahwa pengendalian internal terdiri dari rencana organisasi yang mengkoordinasikan dan melakukan pengukuran dalam suatu usaha untuk mengamankan aset (harta perusahaan), mengecek keakuratan dan data akuntansi yang dapat dipercaya sehingga dapat meningkatkan operasional secara efisien dan meningkatkan ketaatan terhadap kebijakan manajerial.

*The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission*

COSO (2013:3) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

*Internal control is a process, effected by an entity’s boar of directors, manage-ment, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.*

Dapat dikatakan bahwa pengertian pengendalian internal menurut COSO tersebut adalah proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian internal dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal dirancang dan dioperasikan, hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya. Bahkan bagaimanapun baiknya pengendalian internal yang ideal dirancang, namun keberhasilan tergantung pada kompetisi dan kendala dari pada pelaksanaannya yang tidak terlepas dari berbagai keterbatasan.

Moeller (2009:32) memberikan definisi mengenai pengendalian internal sebagai berikut:

*Internal control is a process, affected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:*

- a. Effectiveness and efficiency of operations.*
- b. Reliability of financial reporting.*
- c. Compliance with applicable laws and regulations.*

Pengendalian internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang meliputi (1). keandalan pelaporan keuangan, (2). Efektifitas dan efisiensi operasi, (3). Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa:

“Sistem pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang kemudian disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu kegiatan pengendalian yang terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi, keandalan dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi, yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengendalian umum

Pengendalian ini meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan.

b. Pengendalian aplikasi

Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

### 2.1.2 Unsur Unsur Pengendalian Internal

Menurut COSO (2013:4) dalam *Internal Control-Intergrated Framework* (ICIF) komponen pengendalian internal sebagai berikut :

#### 1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur. Indikator-indikator lingkungan pengendalian sebagai berikut:

1. Integritas dan nilai etika organisasi adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas, serta bagaimana standar itu dikomunikasikan dan diberlakukan dalam praktik yang meliputi tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin membuat karyawan melakukan tindakan tidak jujur, ilegal, atau tidak etis dan juga meliputi cara mengkomunikasikan nilai-nilai entitas dan standar perilaku kepada para karyawan melalui pernyataan kebijakan, kode perilaku dan teladan (Arens, 2009:376).
2. Parameter-parameter pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dalam mengelola organisasinya.
3. Struktur organisasional entitas menentukan garis-garis tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang ada. Auditor dapat mempelajari pengelolaan dan unsur-unsur fungsional bisnis serta

melihat bagaimana pengendalian diimplementasikan dengan cara memahami struktur organisasi klien (Arens, 2009:277).

4. Proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten.
5. Ketegasan mengenai tolak ukur kinerja, insentif, dan penghargaan untuk mendorong akuntabilitas kinerja.

## **2. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)**

Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas di anggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko harus dikelola oleh organisasi. Ada 4 prinsip yang mendukung penilaian risiko dalam organisasi yaitu:

1. Organisasi menentukan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan.
2. Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
3. Organisasi mempertimbangkan potensi penipuan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.

4. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.

### 3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi. Menurut Azhar Susanto (2013:99) jenis pengendalian aktivitas diantaranya yaitu:

1. Prosedur otorisasi

Prosedur ini dibuat untuk memberikan otorisasi (kewenangan) kepada karyawan untuk melakukan aktivitas tertentu dalam suatu transaksi. Prosedur otorisasi sangat tergantung kepada otorisasi apa yang akan dilakukan. Ada dua macam otorisasi yang diberikan oleh manajemen, yaitu:

- Otorisasi umum, berkaitan dengan transaksi secara keseluruhan. Otorisasi umum menggambarkan kondisi dimana karyawan mengawali, mencatat, memproses satu jenis transaksi. Ketika kondisi tertentu terpenuhi karyawan diberi otorisasi (wewenang) untuk melakukan transaksi tanpa terlebih dahulu harus berkonsultasi.

- Otorisasi khusus, diterapkan hanya kepada jenis transaksi tertentu. Manajemen umumnya memerlukan otorisasi khusus untuk transaksi yang jumlahnya besar atau transaksi yang berpotensi menimbulkan penyelewengan. Sebelum karyawan mengawali transaksi tertentu yang telah ditentukan, karyawan harus berkonsultasi dulu kepada manajemen untuk memperoleh persetujuan melakukan transaksi.

## 2. Mengamankan aset dan catatannya

Pengamanan aset dan catatannya ini meliputi keamanan fisik dan kepastian tanggung jawab.

- Keamanan fisik

Menerapkan prosedur tertentu untuk memberikan keamanan secara fisik pada persediaan, uang tunai, tanah, gedung-gedung, peralatan, dan catatan yang berkaitan dengan aset.

- Kepastian tanggung jawab

Manajemen memberi tanggung jawab untuk melindungi aset dan data tertentu kepada karyawan. Jika terjadi suatu penyimpangan manajemen akan meminta karyawan tersebut untuk bertanggung jawab.

## 3. Pemisahan fungsi

Manajemen dalam memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada karyawan harus menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada

seseorang dan kepada orang lain. Pemisahan ini akan mengurangi kesempatan kepada karyawan untuk melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan selama melaksanakan tugasnya. Tugas yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk otorisasi melakukan transaksi, mencatat transaksi, dan memelihara posisi asset.

4. Catatan dan dokumentasi yang memadai

Manajemen harus mengharuskan penggunaan dokumen dan catatan akuntansi untuk menjamin setiap peristiwa atau transaksi akuntansi yang terjadi telah dicatat dengan tepat.

**4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)**

Informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan berbagi. Kebanyakan organisasi membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu. Khusus berkenaan dengan informasi akuntansi, menurut Jusuf (2003:127), Indikator-indikator dari informasi dan komunikasi terdiri dari:

1. Eksistensi, yang menunjukkan apakah angka-angka yang dimasukkan dalam laporan keuangan memang seharusnya dimasukkan.
2. Kelengkapan, merupakan angka-angka transaksi yang seharusnya dimasukkan dan diikuti sertakan secara lengkap serta mempertimbangkan materialitas dan biaya.
3. Akurasi, yakni mengacu kepada jumlah yang dimasukkan dengan jumlah yang benar.
4. Klasifikasi, bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal telah diklasifikasikan dengan tepat.
5. Tepat waktu, dimana pencatatan transaksi dicatat pada tanggal yang tepat.
6. *Posting*, pengikhtisaran, di mana transaksi yang tercatat secara tepat dimasukkan dalam berkas induk dan diikhtisarkan dengan benar.

##### **5. Aktivitas Pemantauan (*monitoring Activities*)**

Aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah ataupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektivitas evaluasi yang sedang berlangsung, dan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan-temuan

dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, lembaga-lembaga pembuat standar yang diakui atau manajemen dan dewan direksi, dan kekurangan-kekurangan yang dikomunikasikan kepada manajemen dan dewan direksi. Menurut Jusuf (2003:54) menyebutkan bahwa, aktivitas pemantauan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Frekuensi penilaian aktivitas, merupakan tingkat keseringan dari kegiatan penilaian aktivitas.
2. Fungsi internal audit, yakni efektif atau tidaknya fungsi dari internal audit yang ditandai dengan adanya dukungan kompetensi, integritas dan objektivitas.
3. Saran dari akuntan, dimana tanggung jawab untuk menentukan kebijakan akuntansi yang sehat dan terlaksananya struktur pengendalian intern dengan baik serta tersajinya laporan keuangan yang wajar terletak pada manajemen bukannya auditor. Namun demikian, auditor berkewajiban memberikan saran-sarannya.
4. Rekonsiliasi laporan, merupakan rekonsiliasi secara periodik antara fisik aktiva dengan catatan-catatan atau perkiraan-perkiraan buku besar.
5. *Stock opname*, merupakan pemeriksaan secara tiba-tiba dengan maksud untuk melindungi atau mengamankan aktiva dan catatan.
6. Rancangan struktur pengendalian internal, merupakan penelaahan yang hati-hati dan berkesinambungan atas keempat prosedur yang

lain, yaitu: pemisahan tugas yang cukup otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, serta pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.

Berdasarkan PP SPIP nomor 60 tahun 2008 tersebut, sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu :

- 1. Lingkungan pengendalian**, merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian internal.
- 2. Penilaian risiko**, merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya situasi yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang meliputi kegiatan identifikasi, analisis, dan mengelola risiko yang relevan bagi proses atau kegiatan organisasi.
- 3. Kegiatan pengendalian**, merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
- 4. Informasi dan komunikasi**. Informasi merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan

menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

5. **Pemantauan**, merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

### 2.1.3 Tujuan Pengendalian Internal

Arens (2009:370) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya. Kebijakan dan prosedur ini disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut. Manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif yaitu :

- 1) Reliabilitas pelaporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

## 2) Efisiensi dan efektivitas operasi

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakai sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.

## 3) Ketaatan pada hukum dan peraturan

Semua perusahaan publik diharuskan mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

### **2.1.4 Ciri-ciri Pengendalian Internal yang Kuat dan Keterbatasannya**

Menurut Tunggul (2010:209), ciri-ciri pengendalian intern yang kuat yaitu:

1. Karyawan yang kompeten dan jujur antara lain menguasai standar akuntansi, peraturan perpajakan, dan peraturan pasar modal.
2. Transaksi diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
3. Transaksi dicatat dengan benar (jumlah, estimasi, dan perlakuan akuntansi).
4. Pemisahan tugas yang mengambil inisiatif timbulnya suatu transaksi, yang mencatat, dan menyimpan.
5. Akses terhadap asset dan catatan perusahaan sesuai dengan fungsi dan tugas karyawan.

6. Perbandingan secara periodik antara saldo menurut buku dengan jumlah secara fisik.

Keterbatasan pengendalian intern dalam suatu entitas menurut Boynton, (2002:376) adalah:

1. Kesalahan dalam pertimbangan. Pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya.
2. Kemacetan. Terjadi ketika personel salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan atau kelelahan.
3. Kolusi. Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat di deteksi oleh pengendalian internal.
4. Penolakan manajemen. Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan.
5. Biaya versus manfaat. Biaya pengendalian intern suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh.

## 2.2 Kecurangan (*Fraud*)

### 2.2.1 Pengertian Kecurangan

Istilah *fraud* dalam konteks sederhana adalah perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan yang disebut *fraud* mengandung unsur kesengajaan, niat jahat, penipuan (*deception*), penyembunyian (*concealment*), dan penyalahgunaan kepercayaan (*violation of trust*). Perbuatan ini dilakukan untuk mengambil keuntungan haram (*illegal advantage*) yang berupa uang, barang/harta, jasa, penyuapan kepada petugas atau pejabat dalam kerahasiaan bisnis. (Theodorus M. Tuanakotta, 2014:28)

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mendefinisikan *fraud* berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalamnya termasuk unsur-unsur surprise/tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain.

Definisi *Fraud* (Ing) menurut *Black Law Dictionary* dalam Tunggal (2010:218) adalah:

- a. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran/keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan merugikan.
- b. Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat.

- c. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), menyembunyikan fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak merugikan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Tuanakotta (2014: 195) menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian Fraud, yaitu Pasal 362 tentang Pencurian, Pasal 368 tentang Pemerasan dan Pengancaman, Pasal 372 tentang Penggelapan, Pasal 378 tentang Perbuatan curang, Pasal 396 tentang Merugikan Pemberi Piutang dalam Keadaan Pailit, Pasal 406 tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang dengan sengaja atau melawan hukum, Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

### **2.2.2 Kondisi-Kondisi Penyebab Kecurangan**

Menurut Tuanakotta (2014: 205) penyebab atau pemicu *Fraud* dibedakan atas tiga hal yaitu sebagai berikut:

#### **1. Tekanan (*Pressure*)**

Penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan (*pressure*) yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. konsep yang penting disini adalah, tekanan yang

menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi (*sharing*) dengan orang lain. Konsep ini dalam bahasa Inggris disebut *perceived non-shareable financial need*.

## 2. Adanya kesempatan / peluang (*Perceived Opportunity*)

Ada dua komponen dari persepsi tentang peluang ini. Pertama, *general information*, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung *trust* atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Kedua, *technical skill* atau keahlian/ keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut.

## 3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Sudut ketiga dari *fraud triangle* adalah *rationalization* (rasionalisasi) atau mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan dari motivasi untuk melakukan kejahatan. *Rationalization* diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya.

### 2.2.3 Jenis-Jenis Kecurangan

*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Tuanakotta (2014:196) menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree*. Pohon ini menggambarkan cabang-cabang dari *fraud* dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya. *Fraud tree* ini disajikan dalam gambar 2.1.

Berikutini penjelasan ketiga cabang utama *fraud tree* dalam Tuanakotta (2014:196):



**Gambar 2.1**

*Fraud Tree*

## 1. Korupsi (*Corruption*)

Jenis *fraud* ini paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. Bentuk korupsi menurut ACFE digambarkan dalam empat ranting, yakni *conflicts of interests* (benturan kepentingan), *bribery* (penyuapan), *illegal gratuities* (pemberian atau hadiah ilegal), dan *economic extortion* (pemerasan). Cabang dan ranting yang menggambarkan *fraud* yang diberi label “*corruption*” dapat dilihat di sisi kiri dari *fraud tree* (Tuanakotta, 2014:196).

## 2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Missappropriation*)

*Asset Missappropriations* atau “pengambilan aset” secara ilegal dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri. Namun, dalam istilah hukum, “mengambil” aset secara *illegal* (tidak sah atau melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut, disebut menggelapkan. Istilah pencurian, dalam *fraud tree* disebut *larceny*. *Larceny* atau pencurian adalah bentuk penjarahan yang paling kuno dan dikenal sejak awal peradaban manusia. Peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset (*safeguarding of assets*) (Tuanakotta, 2014:199).

### 3. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Statement*)

Jenis *fraud* ini sangat dikenal para auditor yang melakukan *general audit (opinion audit)*. Ranting pertama menggambarkan *fraud* dalam menyusun laporan keuangan dan ranting kedua menggambarkan *fraud* dalam menyusun laporan non-keuangan.

- *Financial*

*Fraud* ini berupa salah saji (*misstatements* baik *overstatements* maupun *understatements*). Cabang dan ranting ini ada dua. Pertama, menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*asset/revenue overstatements*). Kedua, menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya (*asset/revenue understatements*) (Tuanakotta, 2014:203).

- *Non-financial*

*Fraud* ini berupa penyampaian laporan non-keuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya, dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutarbalikan keadaan. Bisa tercantum dalam dokumen yang dipakai untuk keperluan internal maupun eksternal (Tuanakotta, 2014:203).

#### 2.2.4 Klasifikasi Kecurangan

Kecurangan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Menurut Soejono Karni (2000:35), yaitu:

##### 1. Kecurangan Manajemen

Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas sosial ekonomi yang lebih atas dan terhormat yang biasa disebut *white collar crime* (kejahatan kerah putih). Kecurangan manajemen ada dua tipe yaitu kecurangan jabatan dan kecurangan korporasi. Kecurangan jabatan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai jabatan dan menyalahgunakan jabatannya itu. Kecurangan korporasi adalah kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan tersebut misalnya manipulasi pajak.

##### 2. Kecurangan Karyawan

Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan dibandingkan dengan kecurangan yang dilakukan manajemen, kesempatan untuk melakukan kecurangan pada karyawan bawahan jauh lebih kecil. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai wewenang. Pada umumnya semakin tinggi wewenang yang dimiliki, maka semakin besar kesempatan untuk kecurangan.

## **2.3 Laporan Keuangan**

### **2.3.1 Definisi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik, relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Menurut Irham Fahmi (2012: 22), "Laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan". Jumingan (2011), menyebutkan definisi bahwa "Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan". Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

### 2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh IAI adalah:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.
2. Memenuhi kebutuhan besar bersama sebagaimana besar pemakai, namun demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.
3. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup, misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

### 2.3.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual untuk memenuhi tujuannya. Dasar akrual menjelaskan bahwa transaksi dicatat saat kejadian (tidak pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009). Laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif pokok, yaitu:

1. Dapat dipahami. Informasi akuntansi harus cukup transparan sehingga masuk akal bagi pemakai informasi. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bisnis, aktivitas ekonomi dan akuntansi, serta bersedia mempelajari informasi dengan tekun.
2. Relevansi. Informasi harus mampu menyajikan perbedaan bagi pembuat keputusan, yang memiliki nilai prediktif atau umpan balik. Tingkat relevansi dapat dipengaruhi oleh sifat dan materialitas informasi. Materialitas berarti bahwa informasi harus cukup penting bagi pemakai, sehingga jika diabaikan dinyatakan secara salah, hal tersebut akan membuat keputusan yang diambil pemakai menjadi berbeda. Materialitas tergantung pada ukuran pos atau kesalahan yang dinilai pada situasi tertentu akibat pengabaian atau salah saji.
3. Reliabilitas. Informasi dianggap dapat diandalkan jika lengkap, bebas dari kesalahan atau bias yang material, terpercaya, dan dapat diharapkan untuk merepresentasikan secara wajar substansi ekonomi

dari peristiwa atau transaksi yang mendasari (tanpa memandang bentuk hukum peristiwa atau transaksi tersebut).

4. Komparabilitas. Para pemakai biasanya membandingkan laporan keuangan entitas selama suatu periode waktu untuk mengidentifikasi tren dalam posisi dan kinerja keuangannya. Jadi, sangatlah penting bahwa dasar penyusunan dan penyajian harus tetap dapat dibandingkan sepanjang waktu. Komparabilitas bukan berarti keseragaman, atau terus menggunakan prinsip dan kebijakan akuntansi yang sama apabila tersedia alternatif yang lebih relevan dan dapat diandalkan.

#### **2.4 Kecurangan laporan Keuangan (*financial statement fraud*)**

Definisi kecurangan laporan keuangan menurut ACFE (2014:1.203) adalah:

*Financial statement fraud is the deliberate misrepresentation of the financial condition of an enterprise accomplished through the intentional misstatement or omission of amounts on disclosures in the financial statements to deceive financial statement users.*

Kecurangan laporan keuangan dapat diartikan sebagai penggambaran atau penyajian kondisi finansial suatu organisasi yang disengaja salah yang dapat tercapai melalui salah saji yang disengaja atau penghilangan suatu nilai/jumlah atau pengungkapan di laporan keuangan yang bertujuan untuk mengelabui pengguna laporan keuangan.

Diaz (2013: 68), *Fraudulent Statement* seringkali diidentikkan sebagai *management fraud* atau *fraud* yang dilakukan oleh manajemen sebab mayoritas pelaku memang berada pada tingkat atau kedudukan di lini manajerial (pejabat atau eksekutif manajer senior). *Fraudulent Statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif dan manajer senior suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) atau mempercantik penyajian laporan keuangan guna memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi mereka terkait dengan kedudukan dan tanggung jawabnya.

*Fraudulent Statement* mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*, *financial shehanigans* (permainan gila finansial), *accounting gimmicks* (tipu muslihat akuntansi), *cooking the books* (memasak pembukuan), *illegal earning management* (manajemen laba yang tidak sah), *income smoothing* (perataan laba).

Pengungkapan dan pendeteksian *fraudulent statement* sangat membutuhkan kecakapan auditing dan akuntansi. Meskipun tipologi kedua ini paling banyak berkaitan dengan pelaporan keuangan yang dibuat salah atau menipu, namun sebenarnya ACFE menekankan bahwa pelaporan kinerja operasional, permohonan kredit, pernyataan publik (*press release*) yang dibuat untuk mengelabui orang lain guna memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi termasuk *fraudulent statement*.

Institut Akuntan Publik Indonesia (2011) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia.

Menurut Devi (2011), jenis-jenis pada Kecurangan Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. *Timing difference*, mencatat waktu transaksi berbeda atau lebih awal dari waktu transaksi yang sebenarnya.
2. *Fictitious revenues*, menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak terjadi.
3. *Canceled liabilities and expense*, yaitu menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan agar laporan keuangan perusahaan terlihat bagus.
4. *Improper disclosure*, yaitu perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi.
5. *Improper asset valuation*, penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum atas aset perusahaan dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.

Wilopo (2006:24) menyebutkan beberapa indikator Pengukuran Kecurangan Laporan Keuangan yaitu :

1. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya. Manajemen cenderung akan melakukan kecurangan akuntansi yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memanipulasi bukti-bukti transaksi biasanya dengan mengubah besarnya jumlah yang sebenarnya atau mengabaikan aturan akuntansi yang berlaku dalam proses penyusunannya, memalsukan dokumen-dokumen pendukung, dan merubah pencatatan jurnal akuntansi terutama dilakukan pada saat mendekati akhir periode. Hal-hal tersebut dilakukan manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan.
2. Melakukan penyajian yang salah atau penghilangan peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan dari laporan keuangan. Manajemen secara sengaja melakukan salah saji dengan menghilangkan atau mengabaikan suatu peristiwa, transaksi atau informasi yang signifikan dalam laporan keuangan yang dapat memperdayai pengguna laporan keuangan. Tindakan ini dilakukan manajemen untuk memenuhi tujuan laba.
3. Salah menerapkan prinsip akuntansi secara sengaja. Untuk memaksimalkan laba manajemen dapat berbuat curang dengan sengaja menerapkan prinsip akuntansi yang salah seperti mengubah asumsi

yang terkait dengan pencatatan jumlah, klasifikasi dan pelaporan pada transaksi keuangan.

4. Melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencurian (penyalahgunaan/penggelapan) terhadap aktiva yang membuat entitas membayar barang/jasa yang tidak terima. Manajemen dapat melakukan salah saji yang berasal dari penyalahgunaan atau penggelapan aktiva dengan melakukan rekayasa dalam laporan keuangan untuk menutup-nutupi pencurian aktiva tersebut dan menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum.
5. Melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai dengan catatan atau dokumen palsu dan dapat menyangkut satu atau lebih individu diantara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga. Akibat dari tindakan kecurangan tersebut laporan keuangan yang disajikanpun akan salah dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

Ada 3 faktor yang paling umum bagi seorang pelaku dalam menjalankan *fraud* dikenal sebagai *The Fraud Triangle* (Segitiga *Fraud*). Faktor yang terdapat di dalamnya antara lain adalah (Turner et al., 2003):

1. Peluang (*opportunity*)

Peluang adalah peluang yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Para pelaku *fraud* percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Peluang dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, manajemen pengawasan yang kurang baik, dan atau melalui

penggunaan posisi. Kegagalan untuk menetapkan prosedur yang memadai untuk mendeteksi aktivitas *fraud* juga meningkatkan kesempatan terjadinya kecurangan. SAS no. 99 menyebutkan bahwa peluang pada *financial statement fraud* dapat terjadi pada tiga kategori. Kondisi tersebut adalah kondisi industri, ketidakefektifan pengawasan, dan struktur organisasional.

## 2. Tekanan (*pressure*)

Tekanan adalah dorongan orang yang melakukan *fraud*. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain, termasuk hal keuangan dan non keuangan. Menurut SAS no. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan individu, dan target keuangan.

## 3. Rasionalisasi (*rationalization*)

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur (Skousen et al., 2009). Bagi mereka yang umumnya tidak jujur, mungkin lebih mudah untuk merasionalisasi penipuan. Bagi mereka dengan standar moral yang lebih tinggi, itu mungkin tidak begitu mudah. Pelaku *fraud* selalu mencari pembenaran secara rasional untuk membenarkan perbuatannya. Hal ini terjadi akibat adanya sifat-sifat seperti amarah,

dendam, iri hati, tidak percaya diri, dan lain sebagainya sehingga pelaku terdorong untuk melakukan *fraud*.

## 2.5 Peneliti terdahulu

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis/Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Malewa (2015)/ Pengaruh <i>Internal Control</i> dan Internal Audit Terhadap Upaya Meminimalisasi Kecurangan Dalam Laporan Keuangan: Studi Pada Inspektorat Sulawesi Selatan	<i>Internal control</i> memiliki pengaruh yang positif terhadap upaya meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan. Internal audit memiliki pengaruh yang positif terhadap upaya meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan.	Meneliti mengenai <i>Internal Control</i> sebagai variabel independen dan Kecurangan Laporan Keuangan sebagai variabel dependen	Meneliti mengenai Internal Audit sebagai variabel independen
2.	Adelin (2009)/ pengaruh efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi: Studi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kota Padang.	Efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecuranga akuntansi. Perilaku tidak etis berpengaruh	Meneliti mengenai Pengendalian Internal Sebagai variabel Independen dan Kecurangan Akuntansi Sebagai variabel dependen.	Meneliti mengenai ketaatan aturan dan Perilaku tidak Etis sebagai variabel independen.

		signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.		
3.	Nuriana (2015)/ Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Penemuan Kecurangan ( <i>Fraud</i> ): Studi pada PT. PINDAD (PERSERO) Bandung.	Terdapat pengaruh yang signifikan dari Pengendalian Internal terhadap penemuan Kecurangan ( <i>fraud</i> ) di PT. PINDAD.	Meneliti mengenai Kecurangan sebagai variabel dependen dan pengendalian internal sebagai variabel independen.	Penelitian ini dilakukan pada PT PINDAD Bandung.
4.	Sempana Karo Karo (2015)/ Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan kecurangan: Studi pada pemerintah Kabupaten Bandung.	Audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung.	Meneliti mengenai Pengendalian Internal sebagai variabel independen dan Kecurangan sebagai variabel dependen.	Meneliti mengenai Audit Internal sebagai variabel independen.
5.	Asiah (2017)/ Pengaruh <i>bystander Effect</i> dan <i>whistleblowing</i> Terhadap terjadinya Kecurangan Laporan Keuangan: Studi Eksperimen dengan Kasus <i>Fraud</i> pada Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas	Hasil pengujian menunjukkan bahwa <i>bystander effect</i> berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa <i>whistleblowing</i> berpengaruh negative terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan.	Meneliti mengenai Kecurangan Laporan Keuangan sebagai variabel dependen.	Meneliti mengenai <i>bystander Effect</i> dan <i>whistleblowing</i> sebagai variabel independen.

	Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.			
6.	Purwitasari (2013)/ Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen organisasi Dalam Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang: Survey pada 5 Rumah Sakit di Bandung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang. Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi berpengaruh secara signifikan dalam pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang	Meneliti mengenai Pengendalian Internal sebagai variabel independen dan <i>Farud</i> Pengadaan Barang sebagai variabel dependen.	Meneliti mengenai Komitmen Organisasi sebagai variabel independen.
7.	Herman (2013), Pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kecurangan: Studi Empiris pada Kantor Cabang Utama Bank Pemerintah di Kota Padang	Keadilan organisasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pada kantor cabang utama bank pemerintah di Kota Padang.	Meneliti Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel independen dan Kecurangan sebagai variabel dependen.	Penelitian ini menggunakan Pengaruh Keadilan Organisasi sebagai variabel dependen.

8.	Sulastris (2014), <i>Fraud</i> Pada Sektor Pemerintahan Berdasarkan Faktor Keadilan Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Etika Organisasi Pemerintah: Studi Empiris Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Variabel keadilan kompensasi dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>fraud</i> pada sektor pemerintah. Variabel etika organisasi pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap <i>fraud</i> pada sektor pemerintah.	Meneliti tentang <i>fraud</i> di pemerintahan sebagai variabel dependen dan menggunakan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel independen .	Penelitian ini menggunakan Kompensasi dan Etika Organisasi Pemerintah sebagai variabel Independen.
9.	Kurniawan (2013), Pengaruh Moralitas, Motivasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kecurangan Laporan Keuangan: Studi Empiris pada SKPD di Kota Solok	Moralitas dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Motivasi negatif berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan	Meneliti Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel Independen dan Kecurangan Laporan Keuangan sebagai variabel dependen	Meneliti Moralitas dan Motivasi sebagai variabel Independen
10.	Tiro (2014), Pengaruh Pengendalian Internal Dan Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) Pada Pemerintah Kota Palopo	Pengendalian Internal dan Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan ( <i>Fraud</i> ). Pengaruh Pengendalian Internal dan kompensasi secara bersama terhadap kecenderungan kecurangan ( <i>Fraud</i> )	Menggunakan variabel Pengendalian Internal sebagai variabel independen dan kecenderungan kecurangan sebagai variabel dependen.	Meneliti mengenai Kompensasi sebagai variabel independen. Unit analisis penelitian ini yaitu Pemerintah Kota Palopo

		di Pemerintah Kota Palopo ialah sebesar 27,9%		
11.	Zainal (2013), Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Asimetri Informasi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi ( <i>Fraud</i> ): Studi Empiris Kantor cabang Bank Pemerintah dan Swasta di Kota Padang	Efektivitas Pengendalian Intern dan Pemberian Kompensasi berpengaruh negatif terhadap Kecurangan Akuntansi. Asimetri Informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kecurangan Akuntansi	Meneliti mengenai Pengendalian Inten sebagai variabel independen serta hubungan dengan kecenderungan kecurangan akuntansi ( <i>Fraud</i> ) sebagai variabel dependen	Meneliti mengenai Asimetri Informasi dan Kesesuaian Kompensasi sebagai variabel independen.
12.	Shintadevi (2015), Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening pada Universitas Negeri Yogyakarta	Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan dengan Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan. Perilaku tidak etis berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan	Meneliti mengenai Pengendalian Internal sebagai variabel independen dan Kecenderungan Kecurangan sebagai variabel independen.	Penelitian ini unit analisisnya berada di Universitas Negeri Yogyakarta, menggunakan Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi sebagai variabel Independen dan juga Perilaku Tidak Etis sebagai variabel intervening

## 2.6 Kerangka Pemikiran

### **Pengaruh *Internal Control* terhadap Kecurangan Laporan keuangan**

Tuanakotta (2014:277) dalam bukunya menjelaskan bahwa dengan pengendalian internal yang dilaksanakan di suatu organisasi dapat mencegah dan menghalangi dengan membuat jera pelaku *fraud* atau kecurangan, salah satunya kecurangan laporan keuangan. Moeller (2009:32) Pengendalian internal pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tiga tujuan pokok yaitu; keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Kecurangan laporan keuangan berkaitan dengan sistem pengendalian internal yang mana komponen pengendalian internal berhubungan dengan indikasi kecurangan laporan keuangan. Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari komponen pengendalian internal lainnya apabila lingkungan berjalan dengan baik maka keadaan suatu instansi jauh dari tindakan kecurangan pada laporan keuangan (Yuwannita dan Nita, 2016).

Ketika perusahaan atau sebuah entitas memiliki pengendalian internal yang lemah khususnya pada komponen lingkungan pengendalian, manajemen memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan penipuan atau kecurangan laporan keuangan (Lou dan Ming, 2009).

Albrecht (2012) mengungkapkan bahwa salah satu motivasi individu dalam melakukan kecurangan akuntansi adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Individu dengan level penalaran moral rendah cenderung akan memanfaatkan kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal dalam organisasi tersebut untuk kepentingan pribadinya (*self-interest*), misalnya melakukan tindakan kecurangan akuntansi dalam hal ini kecurangan laporan keuangan.

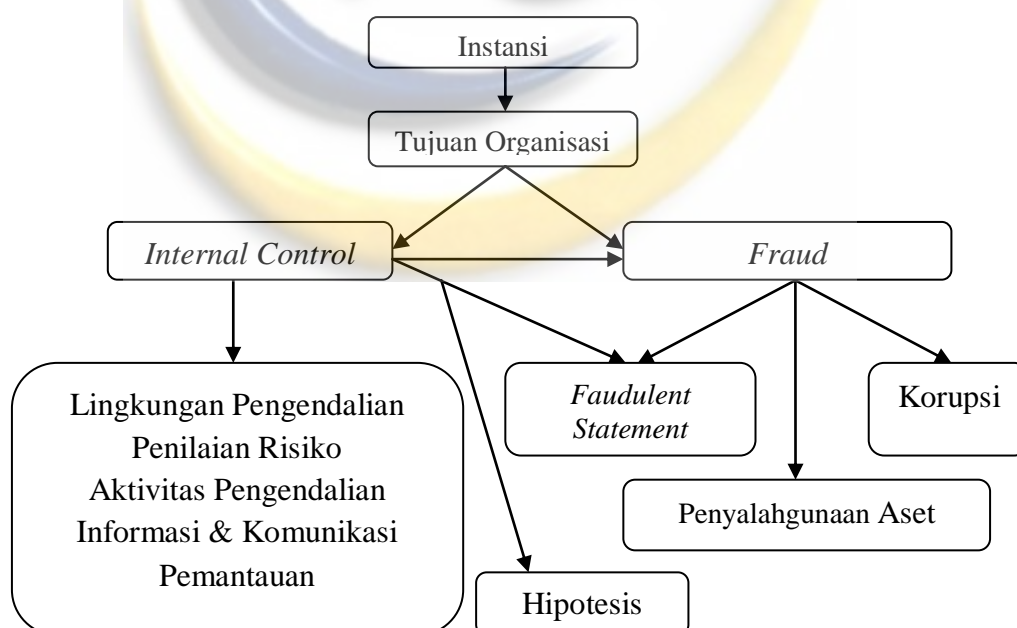
Bell dan Carcello (2000) menyatakan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya penipuan atau kecurangan laporan keuangan adalah lemahnya pengendalian internal (lingkungan pengendalian), pertumbuhan yang cepat, profitabilitas yang tidak memadai atau tidak konsisten dan tidak jujurnya manajemen.

Sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai di lingkungan instansi pemerintah akan mendukung penyelenggaraan kegiatan dan tercapainya tujuan dari organisasi tersebut secara efisien dan efektif, sehingga pengelolaan keuangan negara dapat dilaporkan secara andal, asset negara dapat dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No 60 Tahun 2008).

Pengendalian internal yang efektif dalam suatu instansi diharapkan mampu meminimalisasikan tindakan menyimpang yang tidak sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh seseorang demi keuntungan pribadi. kecenderungan kecurangan akuntansi dapat terjadi apabila pengendalian internal dalam perusahaan tidak berjalan secara efektif. Karena pengendalian internal tidak berjalan secara efektif

tersebut, maka peluang seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan akuntansi sangat terbuka (Shintadevi, 2015).

Penelitian Adelin (2009) mengatakan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap Kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin tinggi tingkat efektivitas pengendalian internal maka akan mampu menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi dalam hal ini kecurangan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Malewa (2015), Nuriana (2015), Kurniawan (2013), dan Zainal (2013) yang meneliti pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap *financial statement fraud*. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menggambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran diatas bisa digambarkan dalam bentuk paradigma penelitian agar lebih mudah dipahami sebagai berikut:



**Gambar 2.3**  
**Paradigma Penelitian**

## **2.7 Hipotesis**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada kerangka pemikiran dan paradigma penelitian mengenai keterikatan antara pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap kecurangan laporan keuangan di pemerintahan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H0: *Internal Control* tidak berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

H1: *Internal Control* berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan Keuangan